



# Frequently Asked Question (FAQ)

## Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK)

### Umum

#### 1 Apa itu MBDK?

MBDK adalah singkatan dari minuman berpemanis dalam kemasan. CISDI mendefinisikan MBDK sebagai<sup>1</sup>:

- Semua produk minuman dalam kemasan yang berpemanis (baik berpemanis gula maupun yang mengandung bahan tambahan pemanis yang lain)
- Semua produk minuman berpemanis dalam bentuk cair, konsentrat, maupun bubuk

Produk-produk tersebut dapat termasuk dan tidak terbatas pada: minuman berkarbonasi, berenergi, sari buah kemasan, isotonik, herbal dan bervitamin, susu berperisa, teh dan kopi kemasan, kental manis, sirup.

#### 2 Apa itu cukai MBDK?

Cukai MBDK adalah cukai yang akan diterapkan ke MBDK dan ditanggung oleh konsumen. Cukai sendiri adalah pungutan terhadap barang-barang tertentu yang karakteristiknya tertulis di perundang-undangan yang bertujuan untuk meregulasi produksi atau konsumsi barang tersebut. Berdasarkan UU Cukai Nomor 39 tahun 2007 dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, barang kena cukai di Indonesia bisa diterapkan bila memenuhi sifat dan karakteristik sebagai berikut:

- Konsumsinya harus dibatasi
- Distribusinya harus diawasi
- Konsumsinya berdampak negatif pada masyarakat atau lingkungan hidup
- Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Di Indonesia sendiri, cukai sampai saat ini hanya diberlakukan untuk tiga kategori barang, yaitu hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

### 3 Mengapa cukai MBDK perlu dikenakan?

Di Indonesia, konsumsi MBDK mengalami peningkatan 15 kali lipat dalam dua dekade terakhir.<sup>1</sup> Konsumsi MBDK yang tinggi meningkatkan risiko kejadian obesitas, penyakit diabetes, hipertensi, kerusakan liver dan ginjal, penyakit jantung, serta beberapa jenis kanker. Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan bahwa ada peningkatan kejadian obesitas dan penyakit tidak menular (PTM) yang substansial selama lima tahun terakhir. Di Indonesia, penyebab kematian tertinggi di Indonesia didominasi oleh PTM, dimana diabetes menempati urutan ketiga.<sup>1</sup>

Konsumsi MBDK juga dapat memberikan dampak negatif terhadap ekonomi. Laporan dari Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2017 hingga 2019, biaya layanan primer dan rujukan perawatan diabetes meningkat hingga 29% hingga mencapai Rp 108 triliun. Biaya ini belum mencakup biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk penyakit-penyakit lainnya. Dengan implementasi cukai MBDK, Kementerian Keuangan mengestimasi bahwa akan terdapat peningkatan pemasukan negara mulai dari Rp 2.7 triliun sampai Rp 6.28 triliun per tahun. Oleh karena itulah, implementasi cukai MBDK harus dilakukan segera untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi MBDK.<sup>1</sup>

Ringkasan kebijakan lebih lengkap dapat dibaca [di sini](#).

### 4 Bagaimana cukai MBDK akan diterapkan?

Cukai MBDK akan meningkatkan harga penjualan MBDK, sehingga dapat menurunkan konsumsi MBDK dan mengurangi dampak buruk terhadap kesehatan dari konsumsi MBDK. Berdasarkan hasil penerapan cukai MBDK yang sudah lebih dahulu diterapkan di 49 negara lain, penerapan sebesar 20% cukai diprediksi akan menurunkan konsumsi MBDK sebesar 24%.<sup>1</sup> Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah untuk mengenakan cukai **MBDK minimal sebesar 20% berdasarkan kandungan gula dan secara komprehensif ke semua minuman berpemanis gula dan non-gula**. Pada penerapannya nanti, tarif cukai MBDK ini perlu ditingkatkan setiap tahunnya untuk dapat menekan konsumsi sesegera dan signifikan mungkin.

### 5 Daripada cukai, mengapa tidak dilakukan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat saja?

Promosi dan edukasi kesehatan adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas kesehatan dan hal ini sudah terus dilakukan. Akan tetapi, upaya promosi dan edukasi kesehatan hanyalah salah satu strategi dan harus didukung dengan kebijakan lain untuk memberikan dampak maksimal untuk menciptakan lingkungan pangan yang lebih sehat di Indonesia. Tidak cukup melalui edukasi, perlu ada kebijakan lain yang lebih komprehensif salah satunya melalui kebijakan fiskal, yaitu cukai MBDK. Cukai MBDK telah terbukti efektif menurunkan tingkat konsumsi MBDK setelah diterapkan.

## 6 Negara mana saja yang sudah menerapkan cukai MBDK?

Sudah ada 49 negara yang menerapkan cukai MBDK. Meksiko menerapkan cukai MBDK sejak tahun 2014 sebesar 10% dan berhasil mengurangi penjualan MBDK sebesar 37% dari tahun 2012 sampai 2016, serta meningkatkan penjualan air minum dalam kemasan (AMDK) dan minuman lain yang tidak terkena cukai.<sup>2</sup> Di Afrika Selatan, cukai diterapkan sejak tahun 2018 sebesar 10% dan melihat penurunan penjualan MBDK sebesar 29% dari tahun 2014 sampai 2019<sup>2</sup>. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, sudah ada empat negara yang menerapkan cukai MBDK yaitu: Thailand (2017), Brunei (2017), Filipina (2018), dan Malaysia (2019).<sup>3</sup>

## Kesehatan

### 1 Apakah pengaruh MBDK terhadap kesehatan?

MBDK adalah salah satu produk yang tinggi kalori yang biasanya memiliki kandungan nutrisi yang minimal, sehingga sering kali disebut dengan produk “kalori kosong”. Kementerian Kesehatan memberikan rekomendasi batas maksimal konsumsi gula per hari sebesar 50 gram.<sup>4</sup> Di Indonesia, lebih dari 60% penduduk mengkonsumsi minimal 1 jenis MBDK per harinya.<sup>5</sup> Studi yang dilakukan tahun 2021, menemukan bahwa 58% konsumsi gula harian di kelompok pria dewasa berasal dari konsumsi MBDK.<sup>6</sup> MBDK memiliki kandungan gula yang tinggi dan tergolong sangat mudah untuk dikonsumsi berlebihan karena tidak menimbulkan rasa kenyang. Studi menunjukkan adanya peningkatan risiko diabetes mellitus tipe 2 sebesar 18% untuk setiap sajian MBDK per hari.<sup>7</sup>

Konsumsi MBDK yang berlebihan meningkatkan jumlah kalori yang dikonsumsi per harinya yang bisa meningkatkan kejadian obesitas di semua kalangan di masyarakat. Obesitas adalah salah satu faktor risiko kejadian diabetes dan PTM. Oleh karena itu, dengan kebijakan cukai MBDK diharapkan masyarakat Indonesia bisa mengurangi konsumsi MBDK yang bisa memberikan dampak buruk terhadap kesehatan.

### 2 Bagaimana cukai MBDK mempengaruhi kesehatan?

Cukai MBDK sudah terbukti dapat menurunkan konsumsi MBDK di masyarakat berdasarkan hasil evaluasi di negara-negara yang sudah terlebih dahulu menerapkan cukai MBDK.<sup>2</sup> Dengan berkurangnya konsumsi MBDK, maka angka kejadian obesitas, diabetes, serta PTM lainnya yang memiliki hubungan erat dengan konsumsi MBDK akan mengalami penurunan juga.

### 3 Apakah minuman dengan pemanis buatan atau pemanis non-gula termasuk yang akan dicukaikan?

Untuk tahap awal ini, cukai MBDK akan diterapkan ke produk minuman dalam kemasan yang menggunakan gula pasir sebagai pemanis. Akan tetapi, tahap selanjutnya diharapkan cukai MBDK juga bisa mencakup MBDK yang mengandung pemanis non-gula (*non-sugar sweeteners*).

#### 4 Mengapa MBDK dengan pemanis non-gula juga sebaiknya dikenakan cukai MBDK?

Di bulan Mei 2023, WHO mengeluarkan laporan terbaru tentang penggunaan pemanis non-gula berdasarkan hasil penelitian terbaru.<sup>8</sup> Dalam laporan tersebut, dikemukakan bahwa pemanis non-gula bukanlah alternatif yang lebih baik dari gula. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemanis non-gula tidak memberikan keuntungan kesehatan jangka panjang baik bagi populasi anak dan dewasa, bahkan bisa meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2 atau penyakit jantung koroner. Sehingga, penggunaan pemanis non-gula **tidak direkomendasikan** untuk tujuan mengontrol berat badan ataupun mengurangi risiko PTM.

Pemanis non-gula yang paling umum di antaranya: *acesulfame K*, *aspartame*, *advantame*, *cyclamates*, *neotame*, *saccharin*, *sucralose*, *stevia* dan turunan *stevia*.

#### 5 Apakah minuman siap saji kekinian juga akan terkena cukai?

Minuman siap saji *kekinian* seperti teh dengan tapioka atau kopi susu di gerai atau restoran, bukan merupakan objek yang akan dikenai cukai MBDK pada saat ini. Akan tetapi, dengan regulasi MBDK melalui cukai, diharapkan juga akan mendorong kebijakan cukai dan penegakan *labelling* untuk produk ini. Selain itu, juga diharapkan adanya perubahan pola konsumsi di Indonesia, sehingga apabila masyarakat ingin membeli minuman *kekinian*, mereka bisa memilih untuk mengurangi kadar gula di minuman mereka, dan tidak mengonsumsi minuman *kekinian* tersebut sampai melebihi batas konsumsi gula harian yang dianjurkan Kementerian Kesehatan.

## Ekonomi/Industri

#### 1 Apakah cukai MBDK akan meningkatkan angka pengangguran?

Tidak.

Berdasarkan hasil penerapan cukai MBDK di negara lain, penerapan cukai MBDK tidak meningkatkan angka pengangguran. Di Meksiko yang telah menerapkan cukai MBDK sejak tahun 2014, tidak ada peningkatan angka pengangguran.<sup>2, 9</sup> Di Peru, kebijakan cukai MBDK serupa yang diterapkan di tahun 2018 juga tidak ditemukan berdampak pada peningkatan angka pengangguran.<sup>10</sup> Industri minuman tidak serta merta akan hancur dengan diterapkannya cukai MBDK. Industri memiliki banyak produk minuman lain selain MBDK dan dengan cukai MBDK, penurunan penjualan MBDK akan diikuti dengan peningkatan penjualan produk minuman lain yang tidak menjadi objek cukai, seperti air minum dalam kemasan (AMDK).

Di luar dari itu, dampak cukai MBDK yang diproyeksikan bisa menurunkan beban PTM akan menghasilkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif yang justru akan mendukung industri. Sekalipun ada lapangan kerja yang hilang, lapangan kerja baru akan timbul sebagai respon terhadap perubahan konsumen yang akan menggunakan uangnya untuk produk atau jasa lain.

**2** *Apakah cukai MBDK akan menyebabkan kebangkrutan di industri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)?*

Tidak.

Walaupun akan ada penurunan angka penjualan MBDK, hasil implementasi di negara lain menunjukkan konsumen justru akan beralih membeli produk minuman lain yang lebih sehat, yang tidak menjadi objek cukai, seperti AMDK. Di Meksiko, penjualan AMDK meningkat sebesar 5% dan minuman tidak kena cukai (seperti minuman rendah gula) mengalami peningkatan penjualan sebesar 11% di tahun pertama setelah diberlakukannya cukai MBDK<sup>2</sup>. Selain itu, implementasi cukai MBDK akan mendorong terjadinya reformulasi produk dan inovasi baru produk minuman lebih rendah gula dan berpotensi menggaet pasar konsumen baru. Studi juga menyebutkan bahwa tidak ada bukti UMKM mengalami kerugian setelah cukai diterapkan.<sup>11</sup>

**3** *Apakah cukai MBDK akan menimbulkan inflasi?*

Tidak. Cukai MBDK akan meningkatkan harga MBDK, dan peningkatan harga ini akan dibebankan kepada konsumen, bukan kepada industri. Tidak ada bukti atau studi yang menunjukkan kaitan inflasi dengan penerapan cukai MBDK.

**4** *Apakah cukai MBDK akan berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok lainnya?*

Tidak. Cukai MBDK akan dikenakan pada produk MBDK saja, bukan ditargetkan pada gula pasir. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan ini akan berpengaruh ke kenaikan harga bahan pokok lainnya. Mekanisme kenaikan harga bahan pokok berbeda dengan mekanisme pengenaan cukai MBDK.

**5** *Hasil pemungutan cukai MBDK akan digunakan untuk apa?*

Kementerian Keuangan mengestimasi bahwa cukai MBDK dapat meningkatkan pemasukan negara mulai dari Rp 2,7 triliun hingga Rp 6,7 triliun per tahun.<sup>1</sup> Walaupun belum ada ketentuan bagaimana pendapatan cukai MBDK akan digunakan, tetapi pemasukan baru ini diharapkan bisa digunakan kembali untuk upaya peningkatan kesehatan masyarakat, contohnya berupa promosi dan program kesehatan untuk mencegah PTM, mengingat anggaran kesehatan tidak lagi memiliki ketentuan *mandatory spending* sebesar 10% dengan disahkannya UU Kesehatan yang terbaru.

Selain itu, perlu diingat juga bahwa beban biaya kesehatan akibat konsumsi MBDK berlebih juga sangat tinggi. BPJS Kesehatan harus mengeluarkan biaya hingga Rp 108 triliun di tahun 2019, meningkat 29% dari tahun 2017, untuk pembiayaan layanan primer dan rujukan terkait diabetes. Sehingga, pemasukan dari cukai juga bisa digunakan untuk memenuhi defisit pendanaan BPJS, yang di tahun 2020 adalah sebesar Rp 6,36 triliun.<sup>1</sup>

## Lain-lain

### 1 *Cukai MBDK lebih menargetkan ke kalangan menengah kebawah. Kalangan yang punya uang akan tetap bisa membeli minuman manis. Bukankah ini bentuk diskriminasi?*

Dibandingkan dengan kelompok lain, kelompok pendapatan lebih rendah lebih terpapar dengan iklan MBDK, lebih banyak mengkonsumsi MBDK, dan lebih banyak menderita komplikasi PTM.<sup>12</sup> Untuk itu, kelompok masyarakat dengan penghasilan lebih rendah akan lebih diuntungkan dengan adanya penurunan konsumsi MBDK. Di Meksiko, ditemukan bahwa daya beli di kelompok pendapatan rendah menurun tiga kali dibandingkan kelompok pendapatan tinggi, dan ini otomatis mengurangi beban cukai MBDK kepada kelompok pendapatan rendah juga.<sup>12</sup> Studi elastisitas harga yang dilakukan CISDI juga menemukan bahwa kelompok ekonomi terendah di Indonesia akan menjadi yang paling responsif terhadap kenaikan harga MBDK. Kelompok ini akan cenderung mengurangi jumlah konsumsi MBDK mereka.<sup>13</sup>

Dengan menurunnya risiko kejadian PTM, maka ke depannya beban biaya kesehatan pribadi (*out-of-pocket*) maupun pemerintah yang akan dikeluarkan juga akan jauh berkurang yang tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup>

### 2 *Apa yang dikonsumsi anak-anak kan tanggung jawab orang tua. Harusnya fokus ke orang tua dibandingkan ke cukai dong.*

Walaupun anak-anak adalah tanggung jawab orang tua, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan lingkungan yang bisa mendukung anak-anak untuk bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Pemberlakuan cukai MBDK bisa mengubah lingkungan tersebut dari yang awalnya dominan dengan MBDK yang tidak memberikan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya, menjadi lingkungan yang memberikan pilihan-pilihan minuman (dan makanan) yang lebih sehat dan bernutrisi.

## Referensi:

1. Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives. (2022). Ringkasan kebijakan: urgensi implementasi kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di Indonesia. Jakarta: CISDI
2. Global Food Research program. (2022) Taxing Sugary Drinks: A Fiscal Policy to Improve Public Health [Fact Sheets]. Available from: [https://www.globalfoodresearchprogram.org/wp-content/uploads/2023/04/GFRP\\_FactSheet\\_SugaryDrinkTaxes\\_2022\\_11\\_corrected.pdf](https://www.globalfoodresearchprogram.org/wp-content/uploads/2023/04/GFRP_FactSheet_SugaryDrinkTaxes_2022_11_corrected.pdf)
3. Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives. (2022). Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di Asia Tenggara: Pembelajaran untuk Indonesia. Jakarta: CISDI
4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji [Internet]. Jakarta; 2013. Available from: [https://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/VHcrbkVobjRzUDN3UCs4eUJ0dVBndz09/2018/10/Permenkes\\_No\\_30\\_Th\\_2013\\_Gula\\_Garam\\_Lemak.pdf](https://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/VHcrbkVobjRzUDN3UCs4eUJ0dVBndz09/2018/10/Permenkes_No_30_Th_2013_Gula_Garam_Lemak.pdf)
5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar 2018 [Internet]. Jakarta; 2018. Available from: [https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir\\_519d41d8cd98f00/files/Hasil-risikesdas-2018\\_1274.pdf](https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-risikesdas-2018_1274.pdf)
6. Andarwulan, N., Madanijah, S., Briawan, D., Anwar, K., Bararah, A., Saraswati, & Średnicka-Tober, D. (2021). Food Consumption Pattern and the Intake of Sugar, Salt, and Fat in the South Jakarta City-Indonesia. *Nutrients*, 13(4). <https://doi.org/10.3390/nu13041289>
7. Malik, V. S., & Hu, F. B. (2022). The role of sugar-sweetened beverages in the global epidemics of obesity and chronic diseases. *Nature Reviews. Endocrinology*, 18(4), 205–218. <https://doi.org/10.1038/s41574-021-00627-6>
8. World Health Organization. (2023). Use of non-sugar sweeteners: WHO guideline. Geneva: World Health Organization; 2023. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
9. Guerrero-López, C. M., Molina, M., & Arantxa Colchero, M. (2017). Employment changes associated with the introduction of taxes on sugar-sweetened beverages and nonessential energy-dense food in Mexico. *Preventive Medicine*. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2017.09.001>
10. Díaz, J.-J., Sánchez, A., Diez-Canseco, F., Jaime Miranda, J., & Popkin, B. M. (2023). Employment and wage effects of sugar-sweetened beverage taxes and front-of-package warning label regulations on the food and beverage industry: Evidence from Peru. *Food Policy*, 115, 102412. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2023.102412>
11. World Cancer Research Fund International (2018). Building momentum: lessons on implementing a robust sugar sweetened beverage tax. Available at [www.wcrf.org/buildingmomentum](http://www.wcrf.org/buildingmomentum)
12. Falbe J. (2020). The ethics of excise taxes on sugar-sweetened beverages. *Physiology & behavior*, 225, 113105. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2020.113105>
13. Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives. (2022). [Ringkasan Kebijakan] Kenaikan harga pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) efektif dalam menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. Jakarta: CISDI.